

BAB IV

SIMPULAN

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini bertujuan untuk meninjau implementasi Standar Biaya Masukan di KPPN Medan II tahun anggaran 2020-2022 serta melakukan analisis terhadap perkembangan dan kendala dalam proses implementasinya. Berdasarkan data dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada rentang tahun 2020-2022 KPPN Medan II selalu menggunakan 13 item sebagai batas tertinggi (lampiran 1) dan 7 item sebagai estimasi (lampiran 2). Pengimplementasian Standar Biaya Masukan pada RKA-K/L KPPN Medan II tahun anggaran 2020-2022 secara keseluruhan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam penerapannya masih ditemukan beberapa kesalahan *minor* yang tidak sesuai antara peraturan terkait Standar Biaya Masukan yang berlaku dan RKA-K/L KPPN Medan II, antara lain:
 - ketidaksesuaian satuan ukur belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota;

- ketidaksesuaian satuan ukur biaya uang lembur dan uang makan lembur bagi pegawai aparatur sipil negara;
- ketidaksesuaian harga satuan honorarium satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti;
- ketidaksesuaian satuan ukur dan harga satuan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
- ketidaksesuaian satuan ukur dan harga satuan honorarium pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

KPPN Medan II terus melakukan perkembangan terhadap penerapan Standar Biaya Masukan pada RKA-K/L satker untuk terus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Pada tahun anggaran 2021 KPPN Medan II berhasil memperbaiki satu kesalahan yang terjadi di tahun anggaran sebelumnya.

2. KPPN Medan II menghadapi kendala berupa kesalahan terhadap satuan ukur dan harga satuan. Pada penerapannya KPPN Medan II melakukan kesalahan yang berulang setiap tahunnya tetapi tidak membuat kesalahan baru dalam proses penyusunan sampai pelaksanaan anggaran. KPPN Medan II juga melakukan perbaikan atas kesalahan setiap tahunnya hal itu terbukti dengan berkurangnya kesalahan dan tidak timbulnya kesalahan baru yang dilakukan oleh satker. Selain kesalahan-kesalahan yang dilakukan, KPPN medan II sudah melakukan penyusunan anggaran sesuai dengan peraturan SBM.